

Pemberdayaan Perempuan pada Program Pemberdayaan Masyarakat

Fadiya Malika Aruf¹, Budi Muhammad Taftazani², Arie Surya Gutama³

¹Universitas Padjadjaran

²Universitas Padjadjaran

³Universitas Padjadjaran

E-mail: fadiya22001@mail.unpad.ac.id¹, budimtunpad@gmail.com², arie@unpad.ac.id³

Article History:

Received: 19 Agustus 2026

Revised: 28 Agustus 2026

Accepted: 06 September 2026

Keywords: *Pemberdayaan Perempuan, Program Pemberdayaan Masyarakat, Model Longwe, Kesenjangan Gender*

Abstrak: *Pemberdayaan perempuan dalam program pemberdayaan masyarakat di Indonesia masih menghadapi kesenjangan antara tujuan kebijakan dan implementasi di lapangan. Penelitian ini bertujuan menggambarkan capaian pemberdayaan perempuan dalam program pemberdayaan masyarakat menggunakan kerangka Model Longwe yang mencakup lima dimensi: kesejahteraan, akses, kesadaran kritis, partisipasi, dan kontrol. Metode yang digunakan adalah Systematic Literature Review (SLR). Hasil kajian menunjukkan bahwa program pemberdayaan masyarakat secara umum berhasil pada dimensi kesejahteraan dan akses, namun belum mampu mencapai dimensi kesadaran kritis, partisipasi bermakna, dan kontrol secara optimal. Program yang berhasil melampaui dimensi dasar memiliki karakteristik yang sama, yaitu menjadikan pendidikan gender dan penguatan agensi perempuan sebagai komponen inti desain program. Temuan ini mengimplikasikan perlunya perancangan program pemberdayaan yang secara eksplisit menargetkan transformasi relasi gender, tidak hanya peningkatan kapasitas ekonomi semata.*

PENDAHULUAN

Perubahan sosial yang berkembang pesat pada era modern telah mendorong transformasi signifikan terhadap peran perempuan dalam berbagai aspek kehidupan. Perempuan tidak lagi dipandang semata-mata sebagai individu yang berfokus pada ranah domestik, melainkan telah aktif berperan dalam pemenuhan kebutuhan keluarga serta pengambilan keputusan sosial maupun ekonomi (Alfons, Goni, & Pongoh, 2017). Meskipun demikian, konstruksi sosial yang menempatkan perempuan sebagai penanggung jawab utama pekerjaan domestik tetap berlangsung, sehingga perempuan harus menjalankan dua peran sekaligus peran publik dan peran domestik (Hyunanda, Ramírez, López-Martínez, & Meseguer-Sánchez, 2021).

Kondisi tersebut menimbulkan beban ganda, yakni situasi perempuan dituntut beradaptasi dengan perubahan sosial tanpa meninggalkan peran tradisionalnya (Putri, Darwis, & Basar, 2015). Beban ganda ini tidak sekadar persoalan keseharian, tetapi berdampak pada kondisi fisik, psikologis, serta peluang perempuan untuk mengembangkan kapasitas dirinya (Mukrima, 2025). Lebih jauh, norma gender yang mengakar turut mempertegas stereotipe bahwa perempuan memiliki keterbatasan dalam pengambilan keputusan, sehingga akses perempuan terhadap sumber

daya, informasi, dan kontrol atas kehidupannya menjadi terbatas (Purnama, 2018; Fitriyaningsih & Faizah, 2020).

Keterbatasan tersebut tercermin dalam capaian Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) di Indonesia. Meskipun BPS mencatat peningkatan IDG nasional dari 76,59 pada 2022, menjadi 76,90 pada 2023, dan mencapai angka tertinggi 77,62 pada 2024, capaian ini belum merata di seluruh wilayah dan belum sepenuhnya menggambarkan kedalaman pemberdayaan perempuan di tingkat komunitas (BPS, 2024). IDG diukur melalui tiga dimensi, yaitu keterwakilan perempuan di parlemen, perempuan sebagai tenaga profesional, dan kontribusi pendapatan perempuan — dimensi-dimensi yang masih belum menyentuh aspek kesadaran kritis, partisipasi substantif, dan kontrol perempuan atas sumber daya dalam kehidupan sehari-hari (Probosiwi, 2015).

Untuk menjawab permasalahan tersebut, pemberdayaan perempuan menjadi strategi penting yang tidak hanya berfokus pada peningkatan kesejahteraan ekonomi, tetapi juga pada penguatan kapasitas, partisipasi, dan kontrol perempuan atas hidupnya (Probosiwi, 2015). Landasan kebijakan pemberdayaan perempuan di Indonesia telah ditegaskan melalui Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional, yang menekankan perlunya pemerataan akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat pembangunan bagi seluruh warga negara tanpa membedakan gender (Fitriyaningsih & Faizah, 2020). Program pemberdayaan masyarakat yang responsif gender dipandang sebagai salah satu instrumen paling efektif untuk mencapai tujuan tersebut karena mampu menjangkau perempuan di tingkat akar rumput (Hanis & Marzaman, 2019).

Berbagai penelitian terdahulu menunjukkan bahwa program pemberdayaan perempuan di Indonesia, seperti program Pemberdayaan Perempuan Kepala Keluarga (Pekka) dan pengembangan desa wisata, baru mampu meningkatkan aspek kesejahteraan dan akses, namun belum mampu mencapai dimensi kesadaran kritis, partisipasi aktif, dan kontrol (Husna & Haryanti, 2021; Arbarini, Desmawati, & Budiartati, 2019). Temuan ini mengindikasikan adanya kesenjangan dalam literatur mengenai sejauh mana program pemberdayaan masyarakat mampu membawa perempuan pada tingkat keberdayaan yang lebih tinggi.

Dalam konteks tersebut, penelitian ini menggunakan Women's Empowerment Framework atau Model Longwe sebagai kerangka analisis untuk mengkaji pemberdayaan perempuan dalam program pemberdayaan masyarakat. Model ini dipilih karena mampu mengidentifikasi tingkat keberdayaan perempuan secara berjenjang melalui lima dimensi, yaitu kesejahteraan, akses, kesadaran kritis, partisipasi, dan kontrol (Husna & Haryanti, 2021). Dengan pendekatan studi literatur, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana program-program pemberdayaan masyarakat berkontribusi terhadap peningkatan keberdayaan perempuan pada setiap dimensi Longwe, serta mengidentifikasi dimensi mana yang paling sering belum tercapai secara optimal.

LANDASAN TEORI

Pemberdayaan Perempuan

Pemberdayaan perempuan merupakan konsep multidimensi yang berlandaskan prinsip kesetaraan gender serta kemampuan perempuan untuk menyampaikan pendapat, sekaligus dipengaruhi oleh keyakinan dan nilai ideologis yang berkembang di masyarakat (Jain, 2023). Mengukur pemberdayaan perempuan menjadi hal yang krusial, tidak hanya untuk mengetahui sejauh mana praktik pemberdayaan telah berlangsung, tetapi juga untuk mendukung perumusan intervensi dan kebijakan yang efektif bagi perempuan (Sham, Salleh, & Sheikh, 2021). Dalam konteks program pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan perempuan tidak cukup hanya berhenti pada peningkatan kesejahteraan material, tetapi harus mencakup penguatan kapasitas, partisipasi aktif, dan kontrol perempuan atas sumber daya dan keputusan yang memengaruhi kehidupannya (Probosiwi, 2015).

.....

Kerangka Analisis Gender dalam Pemberdayaan Perempuan

Terdapat beberapa kerangka analisis yang lazim digunakan untuk mengkaji pemberdayaan perempuan. Sham, Salleh, & Sheikh (2021) memetakan setidaknya tiga kerangka utama yang dapat digunakan atau disesuaikan untuk mengukur pemberdayaan perempuan, yaitu Model Harvard, Model Moser, dan Model Longwe.

Model Harvard merupakan pendekatan paling awal yang dapat diaplikasikan dalam pengumpulan data pada level mikro, khususnya di tingkat rumah tangga dan masyarakat (Sumilat & Wahyuni, 2020). Kerangka ini menganalisis pembagian peran gender, akses dan kontrol terhadap sumber daya, serta faktor-faktor yang memengaruhinya seperti norma sosial, kondisi ekonomi, dan nilai budaya (Tham-Agyekum, et al., 2023). Sementara itu, Model Moser berfokus pada analisis beban kerja perempuan melalui tiga komponen utama, yaitu peran lipat tiga (*triple roles*) yang mencakup kerja reproduktif, produktif, dan komunitas; penilaian kebutuhan gender yang membedakan antara kebutuhan praktis dan kebutuhan strategis; serta analisis data terpilah gender dalam rumah tangga terkait siapa yang mengontrol sumber daya dan pengambilan keputusan (Petten, Lamawuran, & K.L., 2023). Model Harvard cenderung berfokus pada pemetaan peran dan akses sebagai dasar perencanaan kebijakan, namun belum secara eksplisit menilai aspek kesadaran kritis dan relasi kekuasaan. Adapun Model Moser kuat dalam mengidentifikasi beban kerja dan kebutuhan perempuan, namun lebih menekankan peran dan kebutuhan dibandingkan capaian kesetaraan yang terukur (Sham, Salleh, & Sheikh, 2021).

Model Longwe sebagai Kerangka Analisis

Berbeda dengan dua model sebelumnya, kerangka pemberdayaan perempuan yang dikembangkan oleh Sara Hlupekile Longwe dinilai lebih menyeluruh dalam menilai pemberdayaan perempuan sebagai proses bertahap yang mencakup perubahan kondisi material hingga relasi kekuasaan (Sham, Salleh, & Sheikh, 2021). Model ini mencakup dua instrumen utama, yaitu *level of equality* yang terdiri dari lima dimensi berjenjang, serta *level of recognition* yang mengklasifikasikan tingkat kepekaan program ke dalam tiga kategori: negatif, netral, dan positif (March et al., 1999 dalam Ramadhani & Yuliani, 2022). Lima dimensi tersebut bersifat bertahap dan saling berkaitan yaitu semakin tinggi tingkat kesetaraan yang dicapai, semakin besar pula tingkat pemberdayaan yang terwujud (Husna & Haryanti, 2021).

Pertama, dimensi kesejahteraan, yaitu tingkat pemenuhan kebutuhan material dasar perempuan secara setara dengan laki-laki, mencakup sandang, pangan, dan papan. Hal ini sejalan dengan *Basic Need Approach* Streeten (1979) yang menekankan bahwa kebutuhan hidup dasar termasuk pangan, tempat tinggal layak, kesehatan, dan kesempatan pengambilan keputusan penting untuk dipenuhi, khususnya bagi kelompok rentan (Melkote & Steeves, 2015). Namun, jika intervensi pemberdayaan hanya berhenti pada tahap ini, perempuan hanya berposisi sebagai penerima manfaat pasif tanpa kemampuan untuk menghasilkan atau memperoleh manfaat secara mandiri (Husna & Haryanti, 2021).

Kedua, dimensi akses, yaitu kesetaraan kesempatan perempuan dan laki-laki dalam memperoleh dan memanfaatkan sumber daya, termasuk layanan pendidikan, kesehatan, pasar, pinjaman modal, dan layanan publik lainnya. Nussbaum (2000) menegaskan bahwa akses dan kapabilitas perempuan tidak hanya ditentukan oleh kemampuan internal, tetapi juga oleh kondisi eksternal seperti akses ekonomi, hukum, pendidikan, serta peluang sosial dan politik. Kabeer menambahkan bahwa akses terhadap sumber daya merupakan prasyarat agar perempuan dapat meningkatkan agensi dan mencapai perubahan nyata dalam kehidupannya (Desai, Chen, Reddy, & McLaughlin, 2022). Menurut Longwe, kesetaraan akses hanya dapat tercapai melalui reformasi hukum dan perubahan praktik administratif guna menghapus seluruh bentuk diskriminasi terhadap

perempuan (Husna & Haryanti, 2021).

Ketiga, dimensi kesadaran kritis, yaitu munculnya pemahaman kritis mengenai konsep gender serta peran strategis perempuan dalam pembangunan. Dimensi ini berkaitan dengan pemahaman bahwa keterbatasan akses perempuan bukan disebabkan oleh ketidakmampuan individual, melainkan oleh praktik dan aturan diskriminatif yang secara struktural memberikan prioritas kepada laki-laki. Freire (1974) melalui konsep *conscientization* menyatakan bahwa kesadaran kritis membantu seseorang memahami realitas hidupnya, berpikir secara kritis, dan berani bertindak untuk mengubah keadaan, sehingga individu tidak lagi bersikap pasrah melainkan menjadi pelaku perubahan (Lawton, 2022).

Keempat, dimensi partisipasi, yaitu keterlibatan perempuan secara setara dalam proses pengambilan keputusan, perumusan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi program. Uphoff dan Cohen (1977) memandang partisipasi sebagai keterlibatan publik yang mencakup identifikasi masalah, penentuan proses kegiatan, kontribusi sumber daya, pemanfaatan hasil, hingga evaluasi yang dilakukan secara adil dan merata (Marzuki, 2015). Partisipasi merupakan bentuk tindakan nyata yang melengkapi proses penyadaran, karena tidak hanya mencerminkan pemahaman perempuan terhadap hak dan perannya, tetapi juga menunjukkan keterlibatan aktif dalam setiap tahapan pembangunan.

Kelima, dimensi kontrol, yang merupakan pencapaian tertinggi dalam model Longwe, yakni ketika perempuan telah memiliki kendali dalam proses pengambilan keputusan melalui keseimbangan kekuasaan antara laki-laki dan perempuan dalam mengelola distribusi manfaat dan faktor-faktor produksi. Oxaal & Baden (1997) menyatakan bahwa perempuan yang memiliki kemandirian, keahlian, dan kontrol dalam suatu proses dapat dikatakan sebagai perempuan yang berdaya (Hibbs, 2022). Kabeer (1999) menambahkan bahwa kontrol perempuan lazim diukur melalui keterlibatan dalam pengambilan keputusan terkait produksi, pengelolaan pendapatan, kepemilikan aset, dan pembagian manfaat (Quisumbing, et al., 2023). Peningkatan kontrol perempuan berkorelasi positif dengan perbaikan kesejahteraan keluarga, ketahanan pangan rumah tangga, dan kualitas kehidupan secara keseluruhan (Husna & Haryanti, 2021).

Berdasarkan kelima dimensi tersebut, Model Longwe relevan digunakan dalam penelitian ini karena mampu mengukur pemberdayaan perempuan secara komprehensif dari perubahan kondisi material paling dasar hingga perubahan relasi kekuasaan yang paling substantif dalam konteks program pemberdayaan masyarakat.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode Systematic Literature Review (SLR), yaitu pendekatan penelitian yang memastikan proses identifikasi, evaluasi, dan sintesis literatur dilakukan secara sistematis, transparan, dan dapat direplikasi (Snyder, 2019). SLR dipilih karena mampu menghasilkan temuan yang komprehensif dan tepat guna dalam menjawab pertanyaan penelitian mengenai posisi perempuan dalam program pemberdayaan berbasis komunitas.

Pencarian literatur dilakukan pada basis data Google Scholar dan repositori perguruan tinggi, mencakup jurnal terindeks SINTA dan jurnal internasional, buku akademik, laporan kebijakan, serta dokumen resmi pemerintah. Rentang waktu publikasi yang ditinjau adalah tahun 2016 hingga 2026 guna memastikan relevansi dengan perkembangan terkini dalam diskursus pemberdayaan perempuan dan program berbasis komunitas. Kata kunci yang digunakan meliputi: "*pemberdayaan perempuan*", "*program pemberdayaan masyarakat*", "*gender dan pembangunan*", "*women empowerment*", "*community empowerment*", "*women's participation*", dan "*gender equality*". Pencarian dilakukan dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris untuk mengakomodasi literatur nasional maupun internasional.

Seleksi literatur dilakukan berdasarkan kriteria inklusi dan eksklusi yang telah ditetapkan.

Kriteria inklusi mencakup: (1) literatur yang diterbitkan antara tahun 2016 hingga 2026; (2) memiliki relevansi langsung dengan analisis gender serta program pemberdayaan perempuan berbasis komunitas, baik yang bersifat empiris maupun konseptual; dan (3) membahas aspek partisipasi, akses, kontrol, kesadaran kritis, atau agensi perempuan dalam konteks program pembangunan sosial. Kriteria eksklusi meliputi literatur yang tidak membahas perempuan sebagai subjek utama, tidak relevan dengan konteks pemberdayaan berbasis komunitas, tidak dapat diakses secara penuh, bersifat editorial atau opini tanpa dasar empiris maupun teoretis yang kuat, serta duplikasi publikasi.

Proses seleksi dilakukan melalui tiga tahap mengacu pada protokol PRISMA. Tahap pertama adalah *identification*, yaitu identifikasi literatur melalui pencarian pada basis data yang telah ditentukan. Tahap kedua adalah *screening*, yaitu penyaringan berdasarkan judul dan abstrak untuk menilai relevansi awal dengan topik penelitian. Tahap ketiga adalah *eligibility*, yaitu pembacaan *full-text* untuk memastikan literatur memenuhi kriteria inklusi secara substansial. Setiap tahap dilakukan secara sistematis dengan mencatat alasan eksklusi guna menjaga transparansi proses seleksi.

Data yang diekstraksi dari setiap literatur mencakup: (1) informasi bibliografi (penulis, tahun, judul); (2) jenis dan konteks program pemberdayaan yang dikaji; (3) dimensi pemberdayaan yang menjadi fokus berdasarkan kerangka Longwe, yaitu kesejahteraan, akses, kesadaran kritis, partisipasi, dan kontrol; (4) temuan terkait posisi dan agensi perempuan; serta (5) keterbatasan atau tantangan yang diidentifikasi dalam program.

Analisis data dilakukan secara tematik dengan menggunakan kerangka pemberdayaan perempuan Model Longwe sebagai lensa utama. Setiap literatur dianalisis untuk mengidentifikasi pada level mana perempuan ditempatkan dalam program, apakah program berkontribusi pada transformasi relasi gender, serta faktor-faktor struktural yang membatasi atau mendukung pemberdayaan perempuan. Temuan dari berbagai literatur kemudian disintesis untuk mengidentifikasi pola umum, kontradiksi, serta celah pengetahuan dalam literatur yang ada. Proses analisis dilakukan secara reflektif dan kritis dengan mempertimbangkan konteks sosial, budaya, dan politik yang memengaruhi posisi perempuan dalam program pemberdayaan berbasis komunitas.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian didasarkan pada analisis sistematis terhadap 20 sumber literatur dalam tabel 1 yang terpilih melalui kriteria inklusi-eksklusi.

Tabel 1 Proses Pengumpulan Data

No.	Sumber Data	Lokasi & Konteks Program	Temuan Utama
1.	Husna & Haryanti (2021)	Program Forum Pekka yang diinisiasi Dinas PPPAPM yang berlokasi di Kelurahan Mojosongo, Kota Surakarta sebagai wadah pemberdayaan perempuan kepala keluarga rentan kemiskinan.	Program Forum Pekka meningkatkan kesejahteraan dan akses perempuan kepala keluarga, namun belum mencapai kesadaran kritis, partisipasi bermakna, dan kontrol atas sumber daya.

No.	Sumber Data	Lokasi & Konteks Program	Temuan Utama
2.	Arbarini et. Al (2019)	Program pengembangan wisata yang berlokasi di Desa Wisata Lerep dan Desa Wisata Ngrawan (Kabupaten Semarang) ini merupakan upaya pengembangan desa wisata berbasis SDGs di era Revolusi Industri 4.0 dengan analisis gender Model Longwe.	Pengembangan desa wisata berkontribusi positif terhadap pemberdayaan perempuan melalui peningkatan kesejahteraan, akses terhadap sumber daya, kesadaran kritis, partisipasi dalam pengambilan keputusan, dan kontrol terhadap pembangunan desa.
3.	Karwati (2017)	LKP Yuniza, Desa Neglasari merupakan pelatihan kewirausahaan perempuan berbasis potensi alam lokal untuk peningkatan keterampilan ekonomi.	Hasil pemberdayaan menunjukkan kategori cukup, ditandai dengan partisipasi aktif peserta meskipun pemahaman praktik kewirausahaan masih bersifat dasar.
4.	Latipah (2020)	LSM Bening Saguling Foundation, Desa Cihampelas, Kabupaten Bandung Barat; program pemberdayaan ibu rumah tangga melalui pembelajaran kewirausahaan berbasis media digital (YouTube).	Pemanfaatan YouTube meningkatkan kapasitas, keterampilan wirausaha, dan literasi digital ibu rumah tangga, meskipun kemandirian usaha masih dibatasi faktor domestik dan fasilitas.
5.	Dewi (2020)	LKP VIVI Kota Samarinda; program pelatihan tata rias pengantin berbasis pendidikan nonformal untuk meningkatkan keterampilan dan kewirausahaan perempuan melalui pendanaan APBN.	Program pelatihan tata rias pengantin meningkatkan keterampilan praktis dan kesiapan berwirausaha perempuan, namun dampak pemberdayaan masih terbatas pada aspek kapasitas individu dan ekonomi awal.
6.	Kurniawanto & Anggraini (2019)	Desa Kadu Ela, Kecamatan Cadasari, Kabupaten Pandeglang; program pemberdayaan perempuan melalui pengembangan BUMDes berbasis pengolahan hasil pertanian lokal.	Program BUMDes mendorong partisipasi dan manfaat ekonomi awal bagi perempuan, namun masih dibatasi beban ganda, lemahnya pendampingan, dan belum optimalnya keberlanjutan usaha.

No.	Sumber Data	Lokasi & Konteks Program	Temuan Utama
7.	Habib & Sutopo (2024)	Kawasan wisata pantai Kabupaten Tulungagung (Pantai Gemah, Popoh, dan Sine); program pembinaan UMKM perempuan berbasis pelatihan komunikasi pemasaran dan digitalisasi usaha.	Program pembinaan meningkatkan kapasitas usaha dan kepercayaan diri perempuan pelaku UMKM, namun masih dibatasi oleh kendala modal, akses teknologi, dan infrastruktur digital.
8.	Makruf & Hasyim (2022)	Kota Yogyakarta; program literasi digital bagi perempuan melalui pelatihan menulis dan literasi media bekerja sama dengan PWNA DIY.	Program literasi digital meningkatkan kapasitas menulis dan kesadaran isu kekerasan berbasis gender, serta mendorong perempuan berperan sebagai agen perubahan di ruang digital.
9.	Faiqoh & Desmawati (2021)	Dusun Tanuraksan, Desa Gemeksekti, Kabupaten Kebumen; program pendidikan nonformal pemberdayaan perempuan melalui industri rumahan Batik Sekar Jagad (<i>home industry</i>).	Program industri batik rumahan meningkatkan pendapatan dan kemandirian perempuan, didukung keterampilan turun-temurun dan fleksibilitas kerja, namun masih menghadapi kendala usia dan faktor lingkungan.
10.	Geovani et al. (2021)	Kampung Sukapala, Kelurahan Gunung Gede, Kecamatan Kawalu, Kota Tasikmalaya; Program Pemanfaatan Lahan Pekarangan melalui Kelompok Wanita Tani (KWT) Lestari Alam untuk peningkatan sosial ekonomi perempuan.	Program pemanfaatan lahan pekarangan melalui KWT meningkatkan kapasitas sosial dan ekonomi perempuan, ditandai penguatan keterampilan, solidaritas kelompok, tambahan pendapatan, dan penghematan rumah tangga.
11.	Faqih (2020)	Desa Sirnabaya, Kecamatan Gunung Jati, Kabupaten Cirebon; Program Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) melalui Kelompok Wanita Tani untuk penguatan ketahanan pangan keluarga.	Program KRPL meningkatkan pendapatan, ketahanan pangan, dan keterampilan perempuan melalui pemanfaatan pekarangan, namun pemberdayaan masih berfokus pada aspek kesejahteraan dan kapasitas teknis.

No.	Sumber Data	Lokasi & Konteks Program	Temuan Utama
12.	Hanis & Marzaman (2020)	Kecamatan Telaga, Kabupaten Gorontalo; Program Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) sebagai gerakan nasional pemberdayaan keluarga berbasis desa.	Program PKK meningkatkan kapasitas dan kesejahteraan perempuan melalui kegiatan kesehatan, keterampilan, dan ekonomi keluarga, namun partisipasi dan pemahaman kritis masih terbatas.
13.	Butarbutar et al. (2020)	Desa Ujung Pandaran, Kabupaten Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah; program pemberdayaan perempuan pesisir (istri nelayan) melalui pengolahan limbah perikanan menjadi produk kerajinan bernilai ekonomi, difasilitasi pemerintah daerah.	Pemberdayaan perempuan pesisir meningkatkan peluang ekonomi berbasis kerajinan, namun masih dibatasi keterampilan, modal, kelembagaan, dan kapasitas adaptasi terhadap pasar dan teknologi.
14.	Hidayat et al. (2018)	Desa Parahu, Kecamatan Sukamulya, Kabupaten Tangerang; program pemberdayaan perempuan PKK berbasis ekonomi kreatif melalui pemanfaatan limbah kain menjadi produk kerajinan rumah tangga.	Program ekonomi kreatif berbasis limbah kain meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan kepercayaan diri perempuan, namun masih terkendala keterbatasan anggaran dan sarana pendukung.
15.	Khusna & Sari (2024)	Desa Wonosobo, Kecamatan Srono, Kabupaten Banyuwangi; Program Pekarangan Pangan Lestari (P2L) yang dilaksanakan oleh Kelompok Wanita Tani Sri Tanjung dengan dukungan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan.	Program P2L memperkuat peran perempuan melalui pemanfaatan pekarangan berbasis modal sosial budaya lokal, meskipun masih menghadapi keterbatasan kapasitas SDM dan teknologi pemasaran.
16.	Purwasih et al. (2024)	Desa Kace Timur, Kabupaten Bangka; program pemberdayaan perempuan berbasis ekonomi kreatif melalui pelatihan kerajinan rajut dan sulam bagi anggota PKK.	Program meningkatkan keterampilan teknis perempuan dalam produksi kerajinan bernilai ekonomi, namun masih menghadapi keterbatasan pada aspek pemasaran dan keberlanjutan usaha.

No.	Sumber Data	Lokasi & Konteks Program	Temuan Utama
17.	Oktopiah & Mumainah (2024)	Desa Bentarsari, Kecamatan Salem, Kabupaten Brebes; program pemberdayaan perempuan melalui kelompok kerajinan batik tulis <i>Mawar Batik</i> bagi ibu rumah tangga dan perempuan putus sekolah.	Program Mawar Batik meningkatkan pendapatan dan kemandirian ekonomi perempuan, namun masih menghadapi keterbatasan produksi, ketergantungan desain, dan fleksibilitas kerja berbasis peran domestik.
18.	Kertamukti et al. (2025)	Dusun Salakmalang, Desa Banjarharjo, Kecamatan Kalibawang, Kabupaten Kulon Progo; Kelompok Wanita Tani (KWT) Pawon Gendis berbasis pengolahan pangan lokal dan kepemimpinan perempuan.	Kepemimpinan transformasional dalam KWT Pawon Gendis mendorong peningkatan pendapatan, kepercayaan diri, dan kemandirian perempuan melalui inovasi pangan lokal dan dukungan kolektif.
19.	Manurung et al. (2022)	Desa Ciporeat, Kabupaten Bandung; Program Kampung Bangkit berupa edukasi kewirausahaan perempuan pelaku UMKM berbasis Asset Based Community Development (ABCD)	Program Kampung Bangkit meningkatkan kemandirian ekonomi, kepercayaan diri, dan kapasitas pengambilan keputusan perempuan pelaku UMKM, serta berkontribusi pada kesejahteraan keluarga.
20.	Marofah & Ma'ruf (2023)	Desa Kesamben Kulon, Kabupaten Gresik; Program Sekolah Perempuan hasil kolaborasi Pemkab Gresik dan LSM KPS2K untuk perempuan miskin dan marginal dalam kerangka Pengarusutamaan Gender.	Sekolah Perempuan berhasil meningkatkan kesadaran kritis, kapasitas kepemimpinan, dan partisipasi perempuan dalam pembangunan desa melalui pendidikan gender, advokasi, dan kegiatan ekonomi berbasis komunitas.

Berdasarkan hasil *systematic literature review* terhadap 20 artikel, diperoleh gambaran mengenai capaian pemberdayaan perempuan dalam program pemberdayaan masyarakat di Indonesia yang dianalisis menggunakan kerangka Model Longwe. Temuan disajikan secara tematik berdasarkan lima dimensi pemberdayaan perempuan, yaitu kesejahteraan, akses, kesadaran kritis, partisipasi, dan kontrol.

1. Dimensi Kesejahteraan

Dimensi kesejahteraan merupakan dimensi yang paling konsisten dicapai dalam program-program pemberdayaan masyarakat yang dikaji. Sebagian besar literatur menunjukkan bahwa program pemberdayaan berbasis komunitas mampu meningkatkan kesejahteraan material perempuan, terutama melalui penambahan pendapatan keluarga dan peningkatan keterampilan produktif. Program industri batik rumahan di Kabupaten Kebumen (Faiqoh & Desmawati, 2021), program pemanfaatan pekarangan melalui Kelompok Wanita Tani (KWT) di Tasikmalaya (Geovani et al., 2021), dan program Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) di Kabupaten Cirebon (Faqih, 2020) seluruhnya menunjukkan peningkatan pendapatan dan ketahanan pangan sebagai capaian utama. Demikian pula program kerajinan batik Mawar Batik di Kabupaten Brebes

(Oktopiah & Mumainah, 2024) dan KWT Pawon Gendis di Kulon Progo (Kertamukti et al., 2025) mencatat peningkatan pendapatan dan kemandirian ekonomi perempuan sebagai hasil yang terukur.

Meskipun demikian, perlu dicermati bahwa capaian pada dimensi kesejahteraan ini masih bersifat terbatas pada pemenuhan kebutuhan dasar dan peningkatan kapasitas teknis individu, belum menyentuh perubahan struktural yang lebih dalam. Hal ini sejalan dengan peringatan Husna & Haryanti (2021) bahwa jika intervensi pemberdayaan hanya berhenti pada tahap kesejahteraan, perempuan hanya berposisi sebagai penerima manfaat pasif tanpa kemampuan menghasilkan perubahan secara mandiri dan berkelanjutan. Program PKK di Kabupaten Gorontalo (Hanis & Marzaman, 2020) dan program pemberdayaan perempuan pesisir di Kalimantan Tengah (Butarbutar et al., 2020) menjadi contoh kasus di mana capaian kesejahteraan belum disertai dengan penguatan kapasitas yang memadai untuk keberlanjutan jangka panjang.

2. Dimensi Akses

Dimensi akses menunjukkan capaian yang lebih variatif dibandingkan dimensi kesejahteraan. Sebagian besar program berhasil membuka akses perempuan terhadap pelatihan, informasi, dan jaringan sosial, namun akses terhadap sumber daya yang lebih strategis seperti modal, teknologi, dan pasar masih menjadi hambatan yang berulang ditemukan di berbagai literatur.

Program literasi digital di Kota Yogyakarta (Makruf & Hasyim, 2022) dan program pemberdayaan ibu rumah tangga melalui media digital di Kabupaten Bandung Barat (Latipah, 2020) berhasil membuka akses perempuan terhadap informasi dan keterampilan digital. Sementara itu, program Sekolah Perempuan di Kabupaten Gresik (Marofah & Ma'ruf, 2023) menunjukkan capaian akses yang lebih komprehensif karena mencakup akses perempuan terhadap pendidikan gender, advokasi, dan kegiatan ekonomi berbasis komunitas secara bersamaan.

Sebaliknya, sejumlah program masih mencatat keterbatasan akses yang signifikan. Program pembinaan UMKM perempuan di Kabupaten Tulungagung (Habib & Sutopo, 2024) menunjukkan bahwa meskipun kapasitas usaha perempuan meningkat, akses terhadap teknologi digital dan infrastruktur pemasaran masih terbatas. Hal serupa ditemukan pada program BUMDes di Kabupaten Pandeglang (Kurniawanto & Anggraini, 2019) di mana lemahnya pendampingan menjadi faktor penghambat keberlanjutan akses perempuan terhadap sumber daya ekonomi. Temuan ini memperkuat argumen Nussbaum (2000) bahwa akses dan kapabilitas perempuan tidak hanya ditentukan oleh kemampuan internal, tetapi juga oleh kondisi eksternal seperti akses ekonomi, hukum, dan peluang sosial yang perlu didukung secara struktural.

3. Dimensi Kesadaran Kritis

Dimensi kesadaran kritis merupakan dimensi yang paling jarang dicapai dalam program-program yang dikaji. Dari 20 literatur yang dianalisis, hanya empat program yang menunjukkan indikasi capaian pada dimensi ini, yaitu program literasi digital (Makruf & Hasyim, 2022), program Kampung Bangkit (Manurung et al., 2022), program Sekolah Perempuan (Marofah & Ma'ruf, 2023), dan program pengembangan desa wisata di Kabupaten Semarang (Arbarini et al., 2019).

Program literasi digital yang dijalankan bekerja sama dengan PWNA DIY (Makruf & Hasyim, 2022) terbukti tidak hanya meningkatkan kapasitas menulis, tetapi juga mendorong kesadaran perempuan terhadap isu kekerasan berbasis gender sehingga perempuan mulai berperan sebagai agen perubahan di ruang digital. Program Sekolah Perempuan (Marofah & Ma'ruf, 2023) bahkan secara eksplisit menjadikan pendidikan gender dan advokasi sebagai komponen inti program, sehingga mampu mendorong perempuan memahami hak-haknya dalam kerangka pengarusutamaan gender. Sementara program Kampung Bangkit (Manurung et al., 2022) mengindikasikan mulai tumbuhnya kapasitas pengambilan keputusan perempuan meskipun belum

sepenuhnya mencapai transformasi kesadaran gender yang utuh.

Minimnya capaian pada dimensi ini di sebagian besar program mencerminkan kecenderungan program pemberdayaan masyarakat yang lebih berorientasi pada output ekonomi dan peningkatan keterampilan teknis dibandingkan pada perubahan kesadaran struktural. Padahal, sebagaimana dinyatakan Freire (1974) melalui konsep *conscientization*, kesadaran kritis adalah prasyarat bagi perempuan untuk memahami realitas hidupnya dan berani bertindak mengubah keadaan secara kolektif (Lawton, 2022). Tanpa dimensi ini, program pemberdayaan berisiko hanya menghasilkan perubahan permukaan tanpa menyentuh akar ketidaksetaraan gender yang mendasarinya.

4. Dimensi Partisipasi

Dimensi partisipasi menunjukkan pola yang menarik: hampir seluruh program mencatat keterlibatan perempuan dalam kegiatan program, namun kualitas partisipasi tersebut perlu dibedakan antara partisipasi instrumental dan partisipasi bermakna. Partisipasi instrumental merujuk pada kehadiran fisik dalam kegiatan, sedangkan partisipasi bermakna mencakup keterlibatan aktif dalam pengambilan keputusan, perencanaan, dan evaluasi program.

Beberapa program menunjukkan capaian partisipasi yang lebih substantif. Program KWT di Tasikmalaya (Geovani et al., 2021) mencatat penguatan solidaritas kelompok dan keterlibatan kolektif perempuan sebagai indikator partisipasi yang melampaui sekadar kehadiran. Program KWT Pawon Gendis di Kulon Progo (Kertamukti et al., 2025) bahkan menunjukkan kepemimpinan transformasional perempuan dalam pengelolaan kelompok sebagai bentuk partisipasi aktif yang mendorong inovasi. Program Sekolah Perempuan (Marofah & Ma'ruf, 2023) mencatat partisipasi perempuan dalam pembangunan desa melalui advokasi dan kegiatan komunitas sebagai bentuk partisipasi paling tinggi yang ditemukan dalam kajian ini.

Di sisi lain, sebagian besar program masih mencatat partisipasi yang bersifat terbatas. Program Forum Pekka di Surakarta (Husna & Haryanti, 2021) secara eksplisit menyatakan bahwa partisipasi perempuan kepala keluarga belum mencapai tingkat yang bermakna. Program PKK di Gorontalo (Hanis & Marzaman, 2020) juga mencatat bahwa partisipasi perempuan masih bersifat pasif dan belum menyentuh pengambilan keputusan strategis. Temuan ini sejalan dengan Uphoff dan Cohen (1977) yang menyatakan bahwa partisipasi mencakup keseluruhan siklus mulai dari identifikasi masalah, perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi secara adil dan merata (Marzuki, 2015) yang menunjukkan standar belum terpenuhi oleh sebagian besar program yang dikaji.

5. Dimensi Kontrol

Dimensi kontrol merupakan dimensi yang paling jarang dan paling sulit dicapai dalam seluruh literatur yang dianalisis. Dari 20 artikel yang dikaji, hanya satu program yang menunjukkan capaian kontrol secara penuh, yaitu program pengembangan desa wisata berbasis SDGs di Kabupaten Semarang (Arbarini et al., 2019), sementara tiga program lainnya mengindikasikan capaian kontrol yang masih bersifat parsial, yaitu program Kampung Bangkit (Manurung et al., 2022), KWT Pawon Gendis (Kertamukti et al., 2025), dan Sekolah Perempuan (Marofah & Ma'ruf, 2023).

Ketiga program tersebut menunjukkan indikasi awal kontrol melalui kepemimpinan perempuan dalam kelompok dan keterlibatan dalam pengambilan keputusan ekonomi, namun belum mencapai keseimbangan kekuasaan yang setara antara perempuan dan laki-laki dalam pengelolaan sumber daya secara menyeluruh. Sementara program-program lain seperti pelatihan kewirausahaan (Karwati, 2017; Dewi, 2020), ekonomi kreatif (Hidayat et al., 2018; Purwasih et al., 2024), dan program berbasis pertanian (Faqih, 2020; Khusna & Sari, 2024) sama sekali tidak menunjukkan indikasi capaian pada dimensi ini.

Minimnya capaian kontrol dalam program pemberdayaan masyarakat ini relevan dengan

temuan Kabeer (1999) bahwa kontrol perempuan lazimnya diukur melalui keterlibatan dalam pengambilan keputusan terkait produksi, pengelolaan pendapatan, kepemilikan aset, dan pembagian manfaat (Quisumbing et al., 2023). Kondisi ini mengindikasikan bahwa program-program yang ada belum mampu mendorong transformasi relasi kekuasaan gender secara substantif. Norma gender yang mengakar dalam masyarakat, beban ganda yang masih ditanggung perempuan, serta desain program yang lebih berorientasi pada output ekonomi jangka pendek menjadi faktor struktural yang secara konsisten menghambat perempuan mencapai dimensi kontrol (Purnama, 2018; Kurniawanto & Anggraini, 2019).

Secara keseluruhan, temuan kajian ini menunjukkan pola yang konsisten: program pemberdayaan masyarakat di Indonesia cenderung berhasil pada dimensi kesejahteraan dan sebagian akses, namun menghadapi keterbatasan sistemik pada dimensi kesadaran kritis, partisipasi bermakna, dan kontrol. Pola ini mengkonfirmasi temuan sebelumnya oleh Husna & Haryanti (2021) dan Arbarini, Desmawati, & Budiartati (2019) yang menyatakan bahwa program pemberdayaan perempuan di Indonesia umumnya baru mampu meningkatkan aspek kesejahteraan dan akses, tetapi belum mampu mencapai dimensi yang lebih transformatif.

Temuan ini mengisyaratkan adanya *gap* antara tujuan pemberdayaan yang tertulis dalam kebijakan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dengan implementasi aktual di lapangan. Program-program yang berhasil melampaui dimensi dasar, seperti Sekolah Perempuan (Marofah & Ma'ruf, 2023) dan program literasi digital (Makruf & Hasyim, 2022), memiliki kesamaan karakteristik: secara eksplisit memasukkan komponen pendidikan gender, advokasi, dan penguatan agensi perempuan sebagai bagian dari desain programnya — bukan sekadar sebagai dampak sampingan. Hal ini memberikan implikasi penting bagi perancangan program pemberdayaan masyarakat ke depan, yaitu bahwa transformasi relasi gender yang substantif memerlukan intervensi yang secara sadar dirancang untuk menyentuh dimensi kesadaran kritis dan kontrol, tidak cukup hanya dengan menyediakan akses terhadap keterampilan atau sumber daya ekonomi semata.

KESIMPULAN

Hasil kajian terhadap 20 artikel menunjukkan bahwa program pemberdayaan masyarakat di Indonesia secara umum baru mampu menjangkau dimensi kesejahteraan dan akses dalam kerangka Model Longwe, sementara dimensi kesadaran kritis, partisipasi bermakna, dan kontrol masih jarang tercapai. Pola ini mengindikasikan bahwa sebagian besar program lebih berorientasi pada peningkatan kapasitas ekonomi jangka pendek dibandingkan pada transformasi relasi gender yang substantif.

Program yang berhasil melampaui dimensi dasar secara konsisten memiliki satu kesamaan: pendidikan gender dan penguatan agensi perempuan dirancang sebagai komponen inti program, bukan sebagai efek sampingan. Temuan ini menegaskan bahwa pemberdayaan perempuan yang transformatif memerlukan desain program yang secara eksplisit menargetkan perubahan kesadaran dan relasi kekuasaan — tidak cukup hanya dengan menyediakan akses terhadap keterampilan atau sumber daya ekonomi.

Penelitian selanjutnya disarankan memperluas basis data dan mempertimbangkan kajian komparatif antara program berbasis pemerintah dan non-pemerintah untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang paling menentukan keberhasilan pemberdayaan perempuan secara menyeluruh.

DAFTAR REFERENSI

- Afriyanni, Gevisioner, & Amri, R. (2024). *Urban farming dan pemberdayaan perempuan berbasis komunitas*. Jurnal Pertanian dan Pembangunan.
- Alfons, Goni, S. Y. V. I., & Pongoh, M. (2017). Perempuan dan perubahan peran dalam keluarga. *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, 6(2), 112–120.
- Amin, Haniah, Firdaus, & Roslyn. (2024). Transformasi peran perempuan dalam era modern. *Jurnal Studi Gender*, 10(1), 45–58.
- Arbarini, M., Desmawati, L., & Budiartati, E. (2019). Pemberdayaan perempuan berbasis SDGs di desa wisata era Revolusi Industri 4.0. *Journal of Nonformal Education*, 5(2), 111–120.
- Badan Pusat Statistik. (2024). *Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Indonesia 2024*. BPS.
- Butarbutar, R., et al. (2020). Pemberdayaan perempuan pesisir melalui pengolahan limbah perikanan di Kabupaten Kotawaringin Timur. *Jurnal Pemberdayaan Masyarakat*, 5(1), 78–91.
- Desai, S., Chen, M., Reddy, R., & McLaughlin, M. (2022). *Agency and access: Women's empowerment in development contexts*. Oxford University Press.
- Dewi, R. (2020). Program pelatihan tata rias pengantin berbasis pendidikan nonformal di LKP VIVI Kota Samarinda. *Jurnal Pendidikan Nonformal*, 8(1), 34–47.
- Faiqoh, N., & Desmawati, L. (2021). Pemberdayaan perempuan melalui industri rumahan Batik Sekar Jagad di Kabupaten Kebumen. *Journal of Nonformal Education and Community Empowerment*, 5(1), 56–68.
- Faqih, A. (2020). Program Kawasan Rumah Pangan Lestari melalui Kelompok Wanita Tani di Desa Sirnabaya Kabupaten Cirebon. *Jurnal Agribisnis dan Pembangunan Pedesaan*, 2(1), 23–35.
- Fitriyaningsih, & Faizah, N. (2020). Pengarusutamaan gender dalam pembangunan nasional. *Jurnal Kebijakan Publik dan Gender*, 4(1), 12–24.
- Geovani, I., et al. (2021). Pemberdayaan perempuan melalui pemanfaatan lahan pekarangan Kelompok Wanita Tani Lestari Alam di Kota Tasikmalaya. *Jurnal Ilmu Pertanian dan Lingkungan*, 3(2), 89–102.
- Habib, M., & Sutopo, A. (2024). Pembinaan UMKM perempuan berbasis digitalisasi usaha di Kabupaten Tulungagung. *Jurnal Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat*, 8(1), 45–57.
- Hanis, & Marzaman, L. (2019). Program pemberdayaan perempuan berbasis komunitas dan pembangunan sosial. *Jurnal Kesejahteraan Sosial*, 6(2), 34–46.
- Hanis, & Marzaman, L. (2020). Program Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga di Kecamatan Telaga Kabupaten Gorontalo. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 9(1), 56–70.
- Hasibuan, R. (2017). Beban domestik dan keterbatasan perempuan dalam akses pendidikan. *Jurnal Studi Perempuan*, 5(1), 23–34.
- Hermawati, W., Deliarnoor, N. A., & Taryana, A. (2025). Program Buruan SAE sebagai strategi ketahanan pangan Kota Bandung. *Jurnal Administrasi Publik*, 11(1), 12–26.
- Hibbs, J. (2022). *Gender and empowerment: Theoretical frameworks in development studies*. Routledge.
- Hidayat, R., et al. (2018). Program pemberdayaan perempuan PKK berbasis ekonomi kreatif melalui pemanfaatan limbah kain di Kabupaten Tangerang. *Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat*, 4(2), 67–79.
- Husna, N., & Haryanti, R. (2021). Pemberdayaan perempuan kepala keluarga melalui Program Forum Pekka di Kelurahan Mojosongo Kota Surakarta. *Jurnal Pengembangan Masyarakat*, 7(1), 45–60.
- Hyunanda, M., Ramírez, J., López-Martínez, A., & Meseguer-Sánchez, V. (2021). Dual roles of
-

- women in modern society. *Journal of Gender Studies*, 30(4), 345–358.
- Jain, S. (2023). Women's empowerment: A multidimensional concept. *International Journal of Gender and Development*, 15(1), 1–14.
- Karwati, L. (2017). Pemberdayaan perempuan melalui pelatihan kewirausahaan berbasis potensi alam lokal di LKP Yuniza Desa Neglasari. *Jurnal Pendidikan Luar Sekolah*, 13(1), 28–40.
- Kertamukti, R., et al. (2025). Kepemimpinan transformasional dalam KWT Pawon Gendis berbasis pengolahan pangan lokal di Kabupaten Kulon Progo. *Jurnal Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga*, 3(1), 12–25.
- Khikmawati, Bustomi, & Suryatna. (2024). Keterbatasan akses perempuan terhadap teknologi dan informasi. *Jurnal Gender dan Masyarakat*, 8(2), 78–91.
- Khusna, I., & Sari, D. (2024). Program Pekarangan Pangan Lestari melalui Kelompok Wanita Tani Sri Tanjung di Kabupaten Banyuwangi. *Jurnal Ketahanan Pangan*, 6(1), 34–47.
- Kurniawanto, H., & Anggraini, D. (2019). Pemberdayaan perempuan melalui pengembangan BUMDes di Kabupaten Pandeglang. *Jurnal Pemberdayaan Masyarakat*, 4(2), 89–103.
- Latipah, S. (2020). Pemberdayaan ibu rumah tangga melalui pembelajaran kewirausahaan berbasis media digital di Kabupaten Bandung Barat. *Jurnal Pendidikan Nonformal*, 7(2), 56–69.
- Lawton, M. (2022). *Critical consciousness and community empowerment: Freire's legacy in development practice*. Palgrave Macmillan.
- Makruf, I., & Hasyim, A. (2022). Program literasi digital bagi perempuan melalui pelatihan menulis di Kota Yogyakarta. *Jurnal Kajian Gender dan Anak*, 6(1), 23–36.
- Manurung, R., et al. (2022). Program Kampung Bangkit berbasis ABCD untuk perempuan pelaku UMKM di Kabupaten Bandung. *Jurnal Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat*, 6(2), 45–58.
- Marofah, R., & Ma'ruf, A. (2023). Program Sekolah Perempuan dalam kerangka pengarusutamaan gender di Kabupaten Gresik. *Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial*, 12(1), 34–48.
- Marzuki, S. (2015). *Pendidikan nonformal: Dimensi dalam keaksaraan fungsional, pelatihan, dan andragogi*. Remaja Rosdakarya.
- Melkote, S. R., & Steeves, H. L. (2015). *Communication for development in the third world: Theory and practice for empowerment* (3rd ed.). SAGE Publications.
- Mukrima, S. (2025). Beban ganda perempuan bekerja dan dampaknya terhadap kesehatan mental. *Jurnal Kesehatan Masyarakat*, 13(1), 56–68.
- Nussbaum, M. C. (2000). *Women and human development: The capabilities approach*. Cambridge University Press.
- Oktopiah, R., & Mumainah, S. (2024). Program pemberdayaan perempuan melalui kelompok kerajinan batik tulis Mawar Batik di Kabupaten Brebes. *Jurnal Pemberdayaan Perempuan*, 5(1), 23–36.
- Peten, Y., Lamawuran, R., & K.L, M. (2023). Analisis gender Model Moser dalam program pemberdayaan perempuan. *Jurnal Ilmu Sosial*, 10(2), 78–91.
- Prihatiningtyastuti. (2020). Tantangan multidimensi perempuan urban dalam struktur sosial. *Jurnal Sosiologi Perkotaan*, 4(1), 34–47.
- Probosiwi, R. (2015). Perempuan dan perannya dalam pemberdayaan masyarakat. *Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial*, 4(1), 45–56.
- Purnama, D. (2018). Stereotipe gender dan keterbatasan kontrol perempuan atas sumber daya. *Jurnal Studi Gender*, 6(2), 67–79.
- Purwasih, R., et al. (2024). Pemberdayaan perempuan berbasis ekonomi kreatif melalui pelatihan kerajinan rajut dan sulam di Kabupaten Bangka. *Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 7(1), 45–58.

- Putri, A., Darwis, R., & Basar, G. (2015). Beban ganda perempuan dalam perubahan sosial. *Jurnal Studi Perempuan*, 3(1), 23–35.
- Putri, D., Yuningsih, R., & Darmawan, A. (2023). Program Buruan SAE dan pembentukan komunitas perempuan di Kota Bandung. *Jurnal Pembangunan Berkelanjutan*, 5(2), 56–68.
- Quisumbing, A., et al. (2023). *Women's empowerment in agriculture: Measurement and evidence*. International Food Policy Research Institute.
- Ramadhani, F., & Yuliani, S. (2022). Penerapan kerangka Longwe dalam analisis program pemberdayaan perempuan. *Jurnal Gender dan Pembangunan*, 8(1), 34–47.
- Safitri, D., Abdoellah, O., & Gunawan, B. (2021). Urban farming sebagai strategi pemberdayaan perempuan di perkotaan. *Jurnal Sosial Ekonomi Pertanian*, 14(2), 89–102.
- Sham, F., Salleh, S., & Sheikh, A. (2021). Frameworks for measuring women's empowerment: A comparative review. *International Journal of Gender Studies*, 9(1), 1–18.
- Snyder, H. (2019). Literature review as a research methodology: An overview and guidelines. *Journal of Business Research*, 104, 333–339.
- Sumilat, J., & Wahyuni, S. (2020). Teknik analisis gender Model Harvard dalam perencanaan pembangunan berbasis gender. *Jurnal Ilmu Administrasi*, 7(1), 23–36.
- Suwana, F., & Lily. (2017). Akses teknologi informasi dan pemberdayaan perempuan di era digital. *Jurnal Komunikasi dan Gender*, 5(2), 45–58.
- Syarif, A. (2018). Urban farming dan peran perempuan dalam ketahanan pangan keluarga. *Jurnal Ketahanan Pangan*, 4(1), 34–46.
- Tham-Agyekum, E. K., et al. (2023). Harvard analytical framework and gender-responsive policy making. *Journal of Gender and Development*, 31(2), 145–159.
- Widayat, W., Karlina, N., Munajat, A., & Ningrum, R. (2023). Program Buruan SAE dan peningkatan kapasitas perempuan urban. *Jurnal Agribisnis Perkotaan*, 5(1), 23–36.
-